

Strategi linguistik dalam kritik politik: Analisis wacana kritis bahasa kiasan pada *stand-up comedy* Indonesia

Linguistic strategies in political criticism: A critical discourse analysis of figurative language in Indonesian stand-up comedy

Ibrahim^{1,*}, Absri², & Wilda Rahmadani³

^{1,3}Universitas Muhammadiyah Sorong

Jl. Pendidikan No. 27, Sorong, Indonesia

²Universitas Handayani

Jln. Adhyaksa Baru No. 1, Makassar, Indonesia

^{1,*}Email: ibrahim.unamin@um-sorong.ac.id; Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-1065-7303>

²Email: absrilinguistik@gmail.com; Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-4670-907X>

³Email: rahmaawildanii@gmail.com; Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-9907-8767>

Article History

Received 29 July 2025

Revised 18 August 2025

Accepted 11 September 2025

Published 14 October 2025

Keywords

stand-up comedy; political humor; figurative language; critical discourse analysis.

Kata Kunci

stand-up comedy; humor politik; bahasa kiasan; analisis wacana kritis.

Read online

Scan this QR code with your smart phone or mobile device to read online.



Abstract

This study aims to analyze the role of humor, particularly in the form of stand-up comedy, as a medium of socio-political critique in Indonesia. The research data consist of thirteen excerpts from stand-up comedy monologues, analyzed using Critical Discourse Analysis (CDA) with Fairclough's model, which includes textual, discursive, and socio-cultural analysis. Within this framework, the study focuses on the use of figurative language such as metaphor, irony, paradox, and satire as discursive strategies to uncover hidden power relations embedded in political practices. The findings reveal that representations of professions such as foremen, laborers, project supervisors, and canteen workers are transformed into symbols that reflect structures of power, practices of nepotism, patronage, and injustices within the political system. Humor is shown to effectively expose serious issues such as political dynasties, structural inequalities, the erosion of meritocratic principles, and moral hypocrisy, presented in a manner that is light yet incisive. These results affirm that stand-up comedy functions not only as entertainment but also as a counter-discourse that provides a safe, inclusive, and reflective space for society to critique political realities. The study concludes that humor plays a significant role in strengthening public awareness and can be regarded as a form of symbolic resistance against the status quo in contemporary democracy.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran humor, khususnya dalam bentuk *stand-up comedy*, sebagai media kritik sosial-politik di Indonesia. Data penelitian berupa tiga belas kutipan monolog *stand-up comedy* yang dianalisis menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) dengan model Fairclough, yang mencakup analisis tekstual, diskursif, dan sosiokultural. Melalui kerangka ini, fokus kajian diarahkan pada penggunaan gaya bahasa kiasan seperti metafora, ironi, paradoks, dan satir sebagai strategi wacana dalam mengungkap relasi kuasa yang tersembunyi di balik praktik politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa representasi pekerjaan seperti mandor, kuli, pengawas proyek, dan ibu kantin ditransformasikan menjadi simbol yang merefleksikan struktur kekuasaan, praktik nepotisme, patronasi, serta ketidakadilan dalam sistem politik. Humor terbukti mampu menyingkap isu-isu serius seperti politik dinasti, ketimpangan struktural, erosi prinsip keadilan berbasis kemampuan, hingga kemunafikan moral, dengan cara yang ringan namun tetap tajam. Temuan ini menegaskan bahwa *stand-up comedy* tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai wacana tandingan yang menghadirkan ruang aman, inklusif, dan reflektif bagi masyarakat untuk mengkritisi realitas politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa humor berperan signifikan dalam memperkuat kesadaran publik dan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk perlawanan simbolik terhadap *status quo* dalam demokrasi kontemporer.

© 2025 The Author(s). Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya by Universitas Mulawarman

How to cite this article with APA style 7th ed.

Ibrahim, I., Absri, A., & Rahmadani, W. (2025). Strategi linguistik dalam kritik politik: Analisis wacana kritis bahasa kiasan pada *stand-up comedy* Indonesia. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 8(3), 851—870. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v8i3.1438>



Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya
is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution-Share Alike
4.0 International License (CC BY-SA 4.0)



A. Pendahuluan

Dalam konteks media dan dinamika sosial-politik Indonesia yang terus berkembang, *stand-up comedy* kini diakui tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai medium kritik politik dan ruang negosiasi budaya. Berbeda dengan jalur wacana politik formal yang didominasi elit, panggung komedi justru memberi ruang bagi individu non-elit atau kelas pekerja untuk menyuarakan keprihatinan publik. Melalui penceritaan humoris, para komika sering kali mengangkat isu-isu sistemik seperti nepotisme, absurditas birokrasi, hingga kemunduran kepemimpinan moral. Perangkat retorik berupa metafora, ironi, hiperbola, dan pembalikan simbolik tidak hanya memancing tawa, tetapi juga membuka ruang refleksi bagi audiens untuk mempertanyakan dan menafsirkan ulang realitas politik. Humor figuratif dalam komedi tampil sebagai strategi komunikasi yang lebih dari sekadar seni hiburan.

Beberapa penelitian terdahulu telah menekankan pentingnya metafora politik dalam wacana publik. Droog & Burgers (2023) menegaskan bahwa metafora tidak sekadar hiasan bahasa, melainkan alat ideologis yang membingkai persepsi publik terhadap politik. Musolff (2022) menambahkan bahwa metafora bekerja dengan membangun resonansi emosional yang mendorong audiens memberi penilaian moral terhadap aktor politik. Sementara itu, Lee & Kwak (2016) menemukan bahwa satire politik pada ruang nontradisional, seperti klub komedi dan media digital, mampu meningkatkan kesadaran serta partisipasi politik di kalangan generasi muda. Dengan demikian, kajian metafora dan humor politik sebelumnya menyoroti potensi transformatif bahasa figuratif sebagai bentuk komunikasi kritis.

Hasil penelitian terbaru yang menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) juga menunjukkan bahwa praktik wacana hiburan sarat dengan ideologi dan relasi kuasa. Sedgwick (2024) menekankan bahwa wacana populer seperti komedi memiliki fungsi hegemonik sekaligus kontra-hegemonik dalam membentuk opini publik. Beck (2024) mengungkap bahwa humor satiris dalam media digital berperan penting dalam membingkai ulang isu politik global melalui strategi intertekstual dan konotatif. Sementara itu, Mushtaq et al. (2025) menemukan bahwa ambiguitas dalam humor politik dapat berfungsi ganda, di satu sisi memperkuat resistensi, namun di sisi lain justru dinetralkan oleh dominasi wacana arus utama. Dengan kata lain, hasil penelitian terbaru berbasis AWK memperlihatkan bahwa humor tidak hanya membicarakan realitas sosial, tetapi juga menjadi arena perebutan makna yang penuh tarik-menarik antara kritik dan kooptasi.

Beberapa peneliti juga mengingatkan adanya keterbatasan humor figuratif. Shao & Liu (2019) menyebut bahwa satire politik terkadang dapat menimbulkan sinisme, bahkan menjadikan audiens pasif terhadap isu-isu serius. Mushtaq et al. (2025) juga menyoroti bahwa ambiguitas dalam komunikasi satiris bisa membuat pesan politik disalahartikan, atau justru dinetralkan oleh kelompok dominan. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa kiasan dalam komedi bukanlah praktik komunikasi yang bebas risiko, melainkan arena yang sarat tarik-menarik makna. Dengan kata lain, meskipun humor politik memiliki daya subversif, penerimaannya sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan interpretasi audiens.

Temuan lain menunjukkan kekuatan simbolik humor lokal sebagai sarana resistensi. Davis et al. (2018) menemukan bahwa komika mengembangkan strategi retorik berbasis simbol dan metafora lokal yang mudah dipahami masyarakat. Kfrerer et al. (2021) juga menekankan bahwa humor pasca-reformasi di Indonesia menjadi wahana demokratisasi suara, terutama bagi kelompok non-elit. Contoh menarik terlihat pada monolog *Proyek Dinasti* yang menggunakan metafora konstruksi untuk merepresentasikan hierarki politik dan suara buruh. Narasi ini tidak hanya mengkritik elit, tetapi juga memberi legitimasi moral bagi kelas pekerja untuk menjadi komentator sah atas politik nasional.

Kajian yang ada sejauh ini sebagian besar berfokus pada metafora politik dalam komunikasi formal atau dalam ranah digital secara umum, seperti pidato politik, media sosial, maupun wacana kampanye (Forceville, 2024). Analisis mendalam mengenai praktik metaforis dalam *stand-up comedy* Indonesia, khususnya yang berangkat dari pengalaman sehari-hari seperti metafora kerja konstruksi, masih jarang dilakukan. Penelitian terdahulu cenderung menyoroti aspek retorika

politik formal (Charteris-Black, 2011) atau humor dalam konteks digital global (Beck, 2024), sementara praktik bahasa dalam seni pertunjukan komedi yang bersifat populer dan membumi belum banyak digali secara sistematis. Padahal, bentuk humor ini sangat relevan karena mampu menyederhanakan isu politik yang kompleks ke dalam bahasa keseharian yang akrab bagi audiens, sekaligus menciptakan ruang refleksi yang lebih inklusif (Brugman et al., 2023; Meyer, 2015). Dengan cara ini, kritik politik tidak hanya lebih mudah diakses oleh publik luas, tetapi juga lebih kuat dalam membangun wacana tandingan yang menantang *status quo* (Pardede et al., 2023). Hal inilah yang ingin dijumpai penelitian ini, dengan memfokuskan analisis pada penggunaan gaya bahasa kiasan dalam *stand-up comedy* Indonesia sebagai medium kritik sosial-politik.

Berdasarkan hal tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis peran bahasa kiasan dalam *stand-up comedy* Indonesia sebagai medium kritik politik dan agensi budaya. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah bagaimana metafora konstruksi dalam monolog *Proyek Dinasti* digunakan untuk membongkar ulang relasi kekuasaan dan menghadirkan suara alternatif dari kelas pekerja. Analisis ini diharapkan dapat memperlihatkan bagaimana humor figuratif membangun narasi politik alternatif yang menantang hegemoni narasi resmi. Penelitian ini berkontribusi dalam memahami peran komedi sebagai ruang resistensi budaya di era demokratisasi media di Indonesia

B. Metode

Sumber data dalam penelitian ini berupa teks pertunjukan *stand-up comedy* Indonesia, dengan fokus utama pada monolog *Proyek Dinasti*. Data tersebut diperoleh dari rekaman pertunjukan yang tersedia secara publik melalui platform Youtube, kemudian ditranskripsikan ke dalam bentuk teks tertulis. Pemilihan monolog ini dilakukan secara purposif karena karya tersebut menampilkan kritik sosial-politik yang kuat melalui metafora konstruksi, sehingga relevan dengan fokus penelitian mengenai peran bahasa figuratif dalam wacana politik. Data penelitian bersifat kualitatif berupa wacana lisan yang telah dialihkan ke bentuk teks untuk memudahkan analisis sistematis. Pemilihan data secara purposif sesuai dengan pendapat Aspers & Corte (2019), bahwa dalam penelitian kualitatif, data dipilih berdasarkan relevansi terhadap fokus kajian, bukan sekadar representasi jumlah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti menyeleksi rekaman yang berisi pertunjukan *stand-up comedy* dengan tema politik. Kedua, rekaman tersebut ditranskripsi secara verbatim untuk menjaga keutuhan data bahasa lisan. Ketiga, dari hasil transkripsi, bagian-bagian yang mengandung perangkat bahasa figuratif seperti metafora, hiperbola, ironi, dan pembalikan simbolik diidentifikasi serta dipilah. Setiap segmen kemudian dikelompokkan berdasarkan tema dominan, misalnya metafora tentang pembangunan, hierarki kekuasaan, atau kerja kolektif. Hal ini sejalan dengan pandangan Mio (2018) yang menegaskan bahwa metafora bukan hanya ornamen bahasa, melainkan kerangka konseptual yang membentuk cara berpikir dan bertindak manusia.

Data penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik analisis wacana kritis. Analisis difokuskan pada fungsi bahasa figuratif dalam membongkar ulang realitas politik, serta bagaimana narasi yang dibangun oleh komika menantang wacana dominan tentang kekuasaan dan dinasti politik. Metode ini mengikuti kerangka Fairclough, N (2023) yang menekankan bahwa wacana adalah praktik sosial yang sarat ideologi, sehingga analisis harus mempertimbangkan hubungan antara teks, konteks, dan struktur kekuasaan. Dengan cara ini, penelitian dapat mengungkap bukan hanya isi humor, tetapi juga bagaimana humor berfungsi sebagai praktik diskursif yang memproduksi resistensi simbolik.

Lebih jauh, analisis humor politik dalam penelitian ini juga mempertimbangkan pandangan Brugman et al. (2019) mengenai *carnivalesque*, yakni konsep bahwa humor rakyat sering kali berfungsi sebagai pembalikan simbolik terhadap tatanan resmi. Konsep ini penting karena menunjukkan bagaimana *stand-up comedy*, dengan segala permainan bahasanya, menghadirkan dunia alternatif di mana hierarki sosial-politik bisa ditertawakan dan digugat. Dengan demikian,

data yang dianalisis dipahami tidak hanya sebagai teks humor, tetapi juga sebagai dokumen kultural yang memuat dinamika resistensi sosial dan politik.

C. Pembahasan

Stand-up comedy pada masa kini telah berkembang menjadi salah satu bentuk wacana publik yang memiliki pengaruh signifikan, karena menggabungkan unsur hiburan dengan kritik sosial yang disampaikan secara halus namun efektif. Dalam konteks politik, humor berperan sebagai medium alternatif untuk mengekspresikan ketegangan sosial, ketidakadilan, dan ketimpangan yang terjadi di masyarakat dengan cara yang lebih dapat diterima oleh khalayak luas. Menurut Boykoff & Osnes (2019), humor memiliki kekuatan yang mampu membalikkan hierarki sosial melalui tawa. Kritik yang biasanya sulit diucapkan secara langsung dapat disampaikan melalui bahasa komedi yang ringan. Hal ini sejalan dengan pandangan Putri et al. (2016) yang menegaskan bahwa *stand-up comedy* memungkinkan kritik terhadap otoritas dilakukan melalui jalur komunikasi tidak langsung. Selain itu, Pinar-Sanz (2020) menambahkan bahwa humor politik berfungsi sebagai alat ideologis yang menantang narasi dominan serta membingkai ulang wacana publik melalui tawa.

Bahasa kiasan, terutama yang berbentuk metafora, ironi, paradoks, dan satire, memainkan peran yang sangat penting dalam proses penyampaian kritik politik melalui *stand-up comedy*. Dengan memanfaatkan simbol dan tokoh sehari-hari, para komika dapat menyampaikan pesan yang kompleks dalam bentuk yang ringan dan mudah diterima audiens. Misalnya, dalam pertunjukan *stand-up comedy* di Indonesia, sering digunakan tokoh-tokoh seperti mandor, kuli, atau ibu kantin sebagai metafora untuk menggambarkan aktor maupun struktur politik yang berkuasa. Frosh (2011) menyebutkan bahwa metafora dalam humor memungkinkan penonton memahami realitas sosial dari perspektif yang berbeda. Di sisi lain, Leymann et al. (2022) menekankan bahwa ironi dan satire merupakan perangkat retorik utama yang memungkinkan komedian menyampaikan kritik serius tanpa kehilangan unsur hiburan. Dengan cara ini, isu-isu serius dapat dikritik tanpa kehilangan aspek humor yang menjadi ciri khas *stand-up comedy*.

Artikel ini berupaya menganalisis kutipan-kutipan dari monolog *stand-up comedy* “Kuli Dinasti” yang menggunakan bahasa kiasan sebagai sarana untuk menyampaikan kritik politik. Analisis difokuskan pada bagaimana perangkat retorik seperti metafora dan ironi digunakan untuk membingkai ulang realitas politik ke dalam narasi yang dapat memicu refleksi di kalangan penonton. Sebagaimana dinyatakan oleh Oluremi (2019), humor memiliki peran ganda sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas sekaligus menantang kekuasaan. Hal ini juga didukung oleh Sunarso et al. (2022) yang menegaskan bahwa humor politik dapat menjadi cermin yang memperlihatkan ketidakpuasan publik terhadap elit penguasa. Dengan demikian, para komika tidak hanya memarodikan situasi politik, tetapi juga menghadirkan realitas alternatif yang mencerminkan frustrasi publik terhadap praktik kekuasaan yang diwariskan atau bersifat dinastik. Salah satu contoh konkret dari gaya bahasa tersebut adalah kalimat yang menyoroti warisan kekuasaan sebagai bentuk ketidakadilan politik, yang dipresentasikan dengan cara jenaka agar lebih mudah diterima dan diingat oleh audiens.

Data 1

“Bapak saya mandor, om saya pengawas proyek.”

Kalimat “*Bapak saya mandor, om saya pengawas proyek.*” menyampaikan kritik yang cerdas sekaligus jenaka terhadap praktik nepotisme dan politik dinasti dalam pemerintahan Indonesia. Melalui peran-peran konstruksi seperti mandor dan pengawas proyek, komika menggunakan simbol-simbol yang dekat dengan kehidupan sehari-hari untuk menggambarkan kepemimpinan serta pengawasan politik. Hubungan kekerabatan dalam contoh ini memperlihatkan ironi bagaimana kekuasaan diwariskan, padahal sistem demokrasi seharusnya menjunjung asas

keterbukaan. Sebagaimana dijelaskan Fairclough, N. (2023), bahasa dapat berfungsi sebagai praktik sosial yang mereproduksi kekuasaan, dan dalam hal ini humor menjadi sarana untuk menyingkap ketidakadilan yang tersembunyi.

Penggunaan gaya bahasa kiasan ini mendukung pandangan Hellmann (2023) yang menekankan bahwa satire berfungsi sebagai alat pembingkai ulang yang mampu mengubah makna sosial. Dengan membandingkan praktik pewarisan politik dengan peran-peran kerja di lapangan proyek, humor politik menjadi lebih mudah dipahami masyarakat luas. Strategi ini tidak hanya menyampaikan pesan kritis, tetapi juga mendorong audiens untuk melakukan refleksi mendalam tentang kondisi politik yang berlangsung. Hal ini sejalan dengan Burgos et al. (2025) yang menjelaskan bahwa humor sering dipakai sebagai medium penyampai kritik serius dalam bingkai yang ringan.

Menurut Syamsiyah & Rosita (2020), satire dalam komedi memiliki fungsi resistensi simbolik, khususnya dalam situasi di mana kebebasan untuk melakukan protes politik terbatas. Dalam konteks Indonesia, praktik politik dinasti tidak hanya muncul dalam satu partai, tetapi hampir di seluruh spektrum politik. Humor kemudian menjadi medium yang relatif aman untuk menyampaikan kritik, karena dikemas dalam bentuk hiburan. Seperti ditegaskan oleh Skalicky (2019), komedi kerap berperan sebagai "*social commentary*" yang merefleksikan keresahan kolektif masyarakat terhadap kondisi sosial maupun politik.

Yap et al. (2017) mengingatkan adanya sisi lain dari humor politik yang perlu diwaspadai. Satire, dalam beberapa kasus, bisa berfungsi sebagai katup pengaman yang justru melemahkan potensi kritik karena hanya menyalurkan kekecewaan tanpa mengubah realitas. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui humor sering kali disalahartikan sekadar sebagai hiburan ringan, sehingga kehilangan daya kritisnya. Sebagaimana dinyatakan Piata (2016) humor juga dapat memperkuat hierarki sosial jika audiens gagal menangkap maksud kritis di baliknya.

Dalam praktik *stand-up comedy* Indonesia, penggunaan kalimat semacam ini tetap memiliki peran penting. Kritik politik yang disampaikan lewat humor menjadikan isu-isu kompleks lebih mudah diterima oleh masyarakat. Komika berhasil menyelipkan pesan serius tentang kepemimpinan yang diwariskan, sekaligus mengundang tawa yang menyatukan audiens dalam pengalaman bersama. Dengan begitu, humor tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga medium refleksi sosial yang menyingkap persoalan ketidakadilan dalam politik. Hal ini mendukung pandangan Fubara (2020) bahwa humor mampu mengungkap absurditas dalam struktur kekuasaan melalui tawa.

Data 2

"Kuli baru dua tahun, langsung mau jadi mandor."

Kalimat "*Kuli baru dua tahun, langsung mau jadi mandor.*" menyampaikan kritik satiris yang tajam terhadap fenomena munculnya calon pemimpin politik yang minim pengalaman, namun sudah memiliki ambisi besar untuk meraih posisi kekuasaan. Dalam metafora ini, sosok kuli menggambarkan pendatang baru di ranah politik, sedangkan mandor merepresentasikan jabatan tinggi yang membutuhkan keahlian, pengalaman, dan legitimasi. Kejenakaan muncul dari ironi di mana ambisi melebihi kelayakan, sehingga menyindir kecenderungan sebagian politisi yang ingin mempercepat langkah menuju kekuasaan. Kritik semacam ini menegaskan adanya jurang antara kapabilitas nyata dengan keinginan untuk mendominasi ranah publik, yang dalam praktiknya sering mengabaikan kepentingan masyarakat luas (Mudiawati et al., 2023).

Penggunaan metafora dan ironi dalam ungkapan ini sejalan dengan pandangan Ariesta et al. (2021), yang menekankan bahwa humor memiliki peran penting dalam menyuarakan kritik sosial yang bersifat sensitif, khususnya terhadap otoritas dan kredibilitas. Ungkapan ini mempertanyakan legitimasi aktor-aktor politik yang berhasil naik secara instan, sering kali bukan karena prestasi atau dedikasi, melainkan karena strategi pencitraan atau dukungan kekerabatan. Dalam konteks demokrasi, humor politik semacam ini membantu membuka ruang diskusi tentang keabsahan

kepemimpinan, dengan cara yang lebih dapat diterima masyarakat. Seperti dijelaskan Kuipers (2008), humor politik sering menjadi cermin ketidakpuasan publik terhadap sistem kekuasaan yang tertutup.

Senada dengan itu, Droog et al. (2020) memandang humor sebagai penggunaan bahasa komedi untuk menyampaikan penilaian moral dan sosial. Melalui metafora kuli dan mandor, pesan yang ingin ditegaskan adalah bahwa kepemimpinan sejati seharusnya lahir dari proses panjang yang dilandasi pengalaman, bukan semata hasil dari popularitas, modal politik, atau privilese keluarga. Humor dalam konteks ini menjadi instrumen yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik audiens untuk lebih kritis terhadap kualitas calon pemimpin. Rosita & Hastuti (2025) juga menekankan bahwa humor dapat berfungsi sebagai saluran penting untuk menyampaikan kritik serius dalam format yang lebih ringan dan dapat diterima secara luas.

Namun demikian, Boeynaems et al. (2017), menyatakan bahwa humor memiliki potensi untuk menyederhanakan kritik struktural yang kompleks, sehingga berisiko dipandang hanya sebagai lelucon semata. Audiens yang tidak terbiasa membaca makna kritis dalam komedi mungkin hanya menertawakan ungkapan ini tanpa menangkap substansi yang terkandung di dalamnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Salsabila & Simatupang (2021) yang menegaskan bahwa humor politik dapat berfungsi sebagai katup pengaman yang menyalurkan kekecewaan publik tanpa menghasilkan perubahan nyata. Kekuatan retorik humor bisa berkurang ketika makna mendalamnya gagal ditangkap secara kolektif.

Meskipun memiliki keterbatasan, daya tarik humor ini terletak pada kemampuannya merefleksikan keresahan publik terhadap ambisi yang tidak sebanding dengan kapabilitas. Ungkapan ini mengundang audiens untuk merenungkan kembali pentingnya kualitas kepemimpinan, khususnya mengenai legitimasi yang seharusnya dibangun dari pengalaman dan kompetensi. Seperti ditegaskan oleh Risnawati et al. (2024), humor mampu mengungkap absurditas dalam struktur sosial dan politik melalui tawa, sehingga audiens dapat melihat kenyataan dari sudut pandang baru. Dengan cara itu, humor berfungsi tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai medium kritik sosial yang mengingatkan masyarakat akan pentingnya pemimpin yang layak dan berintegritas.

Data 3

“Tenang nak, nanti Bapak bukain jalan. Kebetulan Paman kamu pengawas.”

Kalimat “*Tenang nak, nanti Bapak bukain jalan. Kebetulan Paman kamu pengawas.*” menyampaikan kritik humoris yang tajam terhadap praktik nepotisme serta normalisasi budaya patronasi dalam politik maupun institusi. Meskipun terdengar santai dan akrab, kalimat ini menyiratkan bagaimana akses terhadap kesempatan sering kali ditentukan oleh ikatan keluarga, bukan melalui kapabilitas atau prestasi individu. Menurut Young et al. (2019), humor memiliki kekuatan untuk menyingkap kontradiksi sosial dengan cara yang ringan namun penuh makna. Dalam hal ini, komedi menjadi sarana untuk memperlihatkan bagaimana sistem yang seharusnya adil justru dipenuhi dengan privilese kekerabatan.

Frasa *bukain jalan* dapat dipahami sebagai metafora bagi akses istimewa yang diberikan secara personal, sedangkan sosok “Paman sebagai pengawas” melambangkan posisi strategis yang sering dimanfaatkan untuk memperkuat jejaring patronasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Zappavigna (2022), yang melihat humor sebagai sarana untuk membongkar “rangka tersembunyi” dari keberlanjutan elit dalam konteks demokrasi pascakolonial. Dugalich (2018) juga menekankan bahwa humor kerap berfungsi untuk mengkritisi relasi ideologis dalam masyarakat. Dengan demikian, bahasa sehari-hari dalam lelucon ini berfungsi sebagai medium kritik yang mampu dipahami publik secara luas.

Tameryan et al. (2018) berpendapat bahwa satire yang dipresentasikan melalui dinamika personal dapat meningkatkan daya pukul kritik politik. Dalam kalimat ini, figur ayah, paman, dan anak merepresentasikan pola pewarisan kekuasaan, keterlibatan langsung dalam sistem, serta

keuntungan pasif yang didapat dari kedekatan struktural. Pinar-Sanz (2020) menyebut fenomena ini untuk memperkuat eksklusivitas elit melalui mekanisme kultural. Humor tersebut mengungkapkan bagaimana nepotisme berlangsung secara halus, tetapi tetap merugikan prinsip keadilan sosial.

Melalui metafora dan satire, kalimat ini memperlihatkan bagaimana kelompok elit mempertahankan dominasinya dengan membuka akses hanya untuk mereka yang memiliki hubungan darah atau jaringan dekat. Praktik semacam ini pada akhirnya melemahkan prinsip menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi. Sebagaimana ditegaskan Schoor (2015), humor politik sering kali menjadi cermin dari keresahan publik terhadap sistem yang eksklusif. Dengan balutan lelucon yang mudah dicerna, kritik ini bukan hanya menghibur, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi tajam atas realitas sosial-politik yang timpang.

Data 4

“Kuli kerja pakai baju partai berbeda-beda tapi akur bikin rumah.”

Kalimat “*Kuli kerja pakai baju partai berbeda-beda tapi akur bikin rumah.*” merupakan sebuah kritik politik yang disampaikan melalui bahasa figuratif dan satir. Pernyataan ini menyindir perilaku para elit politik yang sering kali terjebak dalam konflik dan perpecahan akibat perbedaan afiliasi partai, namun gagal menunjukkan kolaborasi nyata dalam pembangunan bangsa. Ironinya, rakyat biasa yang dalam narasi ini digambarkan sebagai pekerja bangunan justru mampu menghadirkan semangat persatuan dan kerja sama, meskipun mereka datang dengan latar ideologi yang beragam. Hal ini menunjukkan bagaimana humor dapat digunakan sebagai medium kritik sosial yang mampu menyentil ketimpangan hubungan antara rakyat dan elit (Silaški & Đurović, 2019). Dengan demikian, satire ini menegaskan adanya perbedaan besar antara harapan publik dan kenyataan politik di lapangan.

Secara simbolik, atribut *baju partai* merepresentasikan keragaman ideologi politik, sementara sosok kuli melambangkan masyarakat akar rumput yang menjadi penggerak pembangunan nyata. Rumah yang dibangun mereka kemudian menjadi metafora bagi bangsa atau masa depan bersama yang seharusnya menjadi tanggung jawab elit politik. Ironi muncul ketika elit politik yang memiliki kekuasaan justru sibuk bertikai, sementara rakyat kecil bisa bekerja sama membangun sesuatu yang lebih konkret. Dugalich (2018), menjelaskan bahwa humor sering digunakan untuk mengungkap paradoks sosial yang tidak mudah dijelaskan dalam wacana formal. Dalam konteks ini, humor politik menghadirkan kontras tajam antara retorika elit dan praktik keseharian rakyat.

Hal ini sejalan dengan temuan Pettersson et al. (2023) yang menyatakan bahwa humor politik, khususnya dalam ruang digital dan performatif, berfungsi untuk memberi ruang bagi masyarakat untuk mengkritik fragmentasi elit dan kegagalan institusional. Dengan menampilkan rakyat sebagai pihak yang lebih kompeten dan bermoral dibandingkan elit politik, satir ini menjadi bentuk pembalikan simbolik atas klaim legitimasi yang biasanya datang dari atas ke bawah. Sujoko (2020) juga menekankan bahwa humor memiliki kemampuan untuk menantang ideologi dominan melalui representasi satir yang sederhana namun efektif. Narasi tentang kuli dan rumah bukan sekadar humor ringan, tetapi sebuah refleksi mendalam tentang krisis legitimasi politik.

Musolff (2021) menambahkan bahwa humor dalam budaya partisipatif menciptakan ruang di mana kekecewaan kolektif dapat terhubung menjadi kohesi sosial yang baru. Dalam kutipan ini, persatuan para kuli merepresentasikan kolektivitas akar rumput yang justru kontras dengan ketidakmampuan elit untuk bersatu. Ross (2020) menyebut fenomena ini sebagai contoh bagaimana humor menciptakan ruang oposisi kultural terhadap wacana dominan yang gagal merepresentasikan kepentingan masyarakat. Hal ini menunjukkan pergeseran makna legitimasi politik, dari aktor formal di ruang kekuasaan menuju masyarakat biasa sebagai agen moral dan sosial. Dengan begitu, humor berfungsi sebagai hiburan sekaligus sarana perlawanan simbolik.

Pesan kritis dari kalimat tersebut memperlihatkan kontras sosial yang nyata di mana rakyat biasa justru mampu bersatu meskipun berbeda pilihan politik, sedangkan para elit politik terus

sibuk mempertahankan ego dan identitas partai tanpa menghasilkan solusi nyata. Berbagai majas yang digunakan, simbolisme, ironi, dan satir semakin memperkuat daya kritisnya. Menurut Senkbeil (2017), humor politik kerap mencerminkan keresahan publik terhadap sistem yang dianggap tidak adil atau eksklusif. Oleh karena itu, kalimat ini tidak hanya sekadar lucu, melainkan juga menyimpan kritik sosial yang tajam terhadap kebuntuan politik.

Dengan struktur yang ringkas tetapi penuh makna, pernyataan ini sangat efektif digunakan dalam bentuk-bentuk humor politik seperti *stand-up comedy*, puisi protes, meme media sosial. Anderson et al. (2017) menekankan bahwa humor dapat mengungkap rangka tersembunyi yang memungkinkan publik membaca ulang pola-pola kekuasaan. Kalimat ini menyampaikan refleksi penting bahwa kesadaran kolektif justru sering lahir dari masyarakat, bukan dari elit yang berkuasa. Melalui simbolisme, ironi, dan satire, narasi tentang kuli dan rumah ini berhasil membalik logika konvensional tentang siapa yang sebenarnya menjadi penggerak utama pembangunan bangsa.

Data 5

“Kalau kuli kerja berdasarkan visi misi partai... bubar itu rumah.”

Kalimat “*Kalau kuli kerja berdasarkan visi misi partai... bubar itu rumah.*” merupakan satir yang menggunakan metafora konstruksi untuk mengkritik fanatisme politik serta kegagalan dalam mengedepankan kerja nyata. Dalam ungkapan ini, kuli menggambarkan rakyat biasa atau agen pembangunan akar rumput, baik secara simbolik maupun harfiah, sementara rumah melambangkan negara atau tatanan sosial yang sedang dibangun bersama. Frasa visi misi partai merujuk pada ideologi politik sempit yang lebih menekankan kepentingan kelompok dibanding tujuan kolektif bangsa. Hal ini sesuai dengan pandangan Fairclough (2023), yang menyatakan bahwa wacana politik sering kali digunakan sebagai alat ideologis untuk membentuk realitas sosial.

Pesan utama dari kalimat tersebut adalah bahwa pembangunan tidak akan pernah berhasil jika dijalankan berdasarkan kepentingan partai politik semata, bukan pada tujuan nasional yang disepakati bersama. Alih-alih menghasilkan kemajuan, kondisi tersebut justru memunculkan disintegrasi sosial dan politik. Kritik ini menekankan bahwa dominasi ideologi partisan dapat menghambat kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan bersama. Sejalan dengan pandangan Toscano & Fernández-Villanueva (2025), ideologi politik kerap membangun antagonisme yang memisahkan masyarakat daripada menyatukannya dalam agenda kolektif.

Analisis ini juga diperkuat oleh Droog & Burgers (2023), yang berpendapat bahwa komunikasi politik populis cenderung memanfaatkan narasi ideologis untuk memecah-belah masyarakat dan mempertegas batas identitas kelompok. Dalam konteks ini, humor satir berfungsi sebagai instrumen yang mampu mengungkap disfungsi politik akibat kesetiaan berlebihan pada partai. Dengan cara itu, humor menyoroti bagaimana kepentingan ideologis yang sempit justru merusak fondasi kebersamaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Forceville (2024), yang menjelaskan bahwa humor sering digunakan sebagai sarana retorik untuk memperlihatkan kontradiksi dalam praktik politik.

Secara retorik, pernyataan tersebut memanfaatkan simbolisme dan ironi untuk memperkuat kritiknya. Simbolisme terlihat dalam kuli sebagai representasi masyarakat, visi misi partai sebagai ideologi, dan rumah sebagai metafora negara. Ironi muncul dari bayangan yang tidak lazim, jika para pekerja bangunan hanya mementingkan ideologi ketimbang kerja nyata, rumah tidak akan pernah selesai dibangun. Sebagaimana dijelaskan Lee & Kwak (2016), humor berfungsi untuk membalikkan logika konvensional sehingga kontradiksi sosial tampak lebih jelas.

Analisis ini selaras dengan konsep *affective publics* dari Davis et al. (2018), yang menekankan bahwa wacana politik lebih sering didorong oleh afiliasi emosional daripada konsensus rasional. Dengan menyindir kekakuan ideologis, kalimat ini mendorong audiens untuk membayangkan bentuk kerja sama sipil yang lebih pragmatis dan inklusif. Kritik tersebut sekaligus menunjukkan bagaimana masyarakat mampu menghasilkan solidaritas baru melalui humor. Dalam hal ini,

seperti yang dikatakan Charteris-Black (2011), humor berperan untuk membongkar struktur ideologis yang kaku.

Kalimat ini dapat dipahami sebagai kritik cerdas yang dikemas dalam humor politik. Ia menyindir para elit yang gagal menyingkirkan kepentingan sempit demi tujuan kolektif yang lebih besar. Melalui gaya komedi, pesan ini menekankan bahwa persatuan dan pragmatisme di tingkat akar rumput lebih produktif daripada perpecahan ideologis yang diperlihatkan oleh para elit. Kritik semacam ini bukan hanya hiburan, tetapi juga refleksi sosial yang tajam terhadap dinamika politik kontemporer.

Data 6

“Pulang kerja sebelum waktunya... kode etik kuli.”

Ungkapan “*Pulang kerja sebelum waktunya... kode etik kuli.*” merupakan satir tajam yang memanfaatkan ironi sebagai perangkat retorika. Secara literal, pernyataan ini menggambarkan seorang pekerja bangunan yang meninggalkan pekerjaannya sebelum jam resmi berakhir, sebuah tindakan yang jelas dianggap melanggar aturan kerja. Namun, ketika ditempatkan dalam wacana politik, ungkapan ini menyindir para elit politik yang kerap melanggar norma institusional tanpa konsekuensi berarti. Kritik tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan moral, di mana disiplin ditegakkan keras pada kelompok bawah, sementara mereka yang berkuasa justru bebas bertindak. Seperti dijelaskan oleh Fairclough (2023), bahasa politik tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga berfungsi untuk mereproduksi relasi kuasa.

Ironi dalam ungkapan tersebut muncul ketika rakyat biasa, yang diwakili oleh “kuli,” justru dituntut untuk tunduk pada aturan ketat dan standar etika yang kaku. Sebaliknya, para elit tampak kebal terhadap pelanggaran meski bertindak di luar norma institusional. Frasa “kode etik kuli” dengan demikian menjadi sindiran sarkastis terhadap tatanan sosial-politik yang timpang. Humor satir ini bekerja untuk mengekspos kontradiksi, sebagaimana dinyatakan Mio (2018), bahwa humor dapat berfungsi sebagai medium retorik untuk menyingkap ketidakadilan yang sudah dianggap normal.

Kritik ini menyinggung ketidakadilan sistemik dalam penerapan hukum dan etika, terutama dalam masyarakat yang sarat nepotisme. Para elit politik sering kali dilindungi oleh jaringan kekuasaan, sementara rakyat biasa harus menanggung beban aturan. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana norma dan etika hanya berlaku selektif sesuai dengan posisi sosial. Hal ini sesuai dengan pandangan Frosh (2011), yang menegaskan bahwa korupsi dalam demokrasi bukanlah penyimpangan, melainkan praktik yang sudah tertanam dalam struktur kekuasaan. Satir politik tidak hanya mengejek individu tertentu, tetapi juga membuka wacana perlawanan terhadap kontradiksi institusional.

Brugman et al. (2019), masyarakat semakin mengandalkan humor, ironi, dan meme sebagai cara alternatif untuk mengkritisi kemunafikan politik dalam era *post-truth*. Dalam situasi di mana standar akuntabilitas hanya diterapkan secara selektif, satir muncul sebagai instrumen penting untuk merebut kembali wacana moral dari tangan elit. Dengan menyoroti kesenjangan antara nilai-nilai resmi dan praktik aktual, humor politik berfungsi sebagai sarana advokasi sosial. Hal ini diperkuat oleh Kfrerer et al. (2021), yang menekankan bahwa satir politik mampu mendobrak hegemoni wacana elit.

Ungkapan ini tidak hanya lucu, melainkan juga sarat makna kritis. Ia menyindir praktik ketidakadilan yang dilembagakan, sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki sarana untuk melawan melalui humor. Dengan cara ini, satir mampu memobilisasi kesadaran publik tentang ketimpangan etika dan kekuasaan. Sebagaimana dinyatakan oleh Shao & Liu (2019), humor politik pada hakikatnya merupakan bentuk refleksi sosial yang menyingkap absurditas dalam kehidupan bernegara.

Data 7

“Dia kan anak mandor... pengawasnya pamannya.”

Ungkapan “*Dia kan anak mandor... pengawasnya pamannya.*” merupakan bentuk satir ringkas namun sarat makna, yang mengandung ironi simbolik untuk menyindir praktik nepotisme dalam politik. Secara literal, kalimat ini menggambarkan seseorang yang mendapat perlakuan istimewa di sebuah proyek konstruksi hanya karena memiliki hubungan keluarga dengan mandor dan pengawas. Namun, jika ditarik secara metaforis, ungkapan ini mencerminkan praktik umum dalam dunia politik, khususnya di Indonesia, di mana posisi dan perlindungan sering diberikan bukan karena kompetensi, melainkan karena hubungan darah. Hal ini menunjukkan bagaimana relasi personal mampu menyingkirkan prinsip keadilan dan objektivitas. Menurut Droog & Burgers (2023), birokrasi memang cenderung menempatkan kepentingan keluarga di atas aturan formal, sehingga merusak sistem yang telah ditetapkan.

Humor dalam ungkapan tersebut muncul dari keintiman dan keakrabannya dengan pengalaman sehari-hari masyarakat. Banyak orang bisa dengan mudah memahami bagaimana anak mandor mendapat perlakuan khusus karena kedekatan keluarga, dan inilah yang membuat sindiran tersebut terasa relevan sekaligus lucu. Dalam skala yang lebih luas, lokasi proyek menjadi representasi simbolik dari negara, sementara figur “anak mandor” dan “paman pengawas” merefleksikan elit politik yang menikmati privilese dari jejaring kekuasaan. Kondisi ini mengilustrasikan apa yang oleh Musolff (2022) disebut sebagai “reproduksi sosial,” yakni bagaimana kekuasaan dan keuntungan simbolik diwariskan antar generasi. Dalam hal ini humor berfungsi sebagai medium untuk menyoroti ketidakadilan yang tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomena nepotisme yang tercermin dalam ungkapan ini menggambarkan apa yang oleh Beck (2024) disebut sebagai “*oligarchic drift*,” yaitu proses ketika kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok kecil yang saling terhubung melalui keluarga atau jaringan sosial. Dalam konteks ini, demokrasi mengalami erosi karena akses terhadap jabatan publik tidak lagi berdasarkan kapasitas, melainkan pada ikatan darah dan kedekatan politik. Kondisi seperti ini pada akhirnya melemahkan prinsip akuntabilitas dalam sistem demokrasi. Sejalan dengan Boykoff & Osnes (2019), demokrasi yang dikuasai elit keluarga cenderung mengalami stagnasi karena kontrol rakyat terhadap pemimpin menjadi semakin lemah.

Selain itu, Leymann et al. (2022) menegaskan bahwa satir politik berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan sekaligus memproses kekecewaan terhadap institusi demokratis. Melalui humor, masyarakat tidak hanya menemukan hiburan, tetapi juga membentuk solidaritas dalam menghadapi ketidakadilan. Kalimat “*anak mandor... pamannya pengawas*” berfungsi ganda, di satu sisi sebagai lelucon, di sisi lain sebagai alat refleksi kolektif yang mengingatkan publik pada ketimpangan yang terlembagakan. Hal ini sejalan dengan pandangan Hellmann (2023) yang menyebutkan bahwa humor dapat menjadi mekanisme perlawanan, meski dalam bentuk yang ringan dan tidak langsung.

Data 8

“Azan terus, penguin banget disebut kuli agamis... nonton bokep.”

Ungkapan “*Azan terus, penguin banget disebut kuli agamis... nonton bokep.*” merupakan contoh satir tajam yang mengandung ironi, paradoks, sekaligus sarkasme untuk menyindir praktik religiositas performatif dan kemunafikan moral, khususnya dalam ranah politik. Secara literal, kalimat ini menggambarkan seorang pekerja bangunan yang rajin mengumandangkan azan untuk terlihat saleh, tetapi pada saat bersamaan melakukan tindakan bertentangan dengan nilai agama, yakni menonton pornografi. Dalam pengertian figuratif, ekspresi ini menyimbolkan perilaku sebagian figur publik, terutama politisi, yang menonjolkan simbol-simbol keagamaan hanya untuk

membangun citra positif. Fenomena ini merefleksikan paradoks moral, di mana nilai agama dijadikan topeng, sementara perilaku sesungguhnya tidak sejalan dengan norma yang diklaim. Hal ini sejalan dengan analisis Burgos et al. (2025) yang menekankan bahwa performativitas agama sering kali dijadikan instrumen propaganda simbolik dalam kontestasi politik.

Kontras antara tampilan kesalehan dan perilaku tidak bermoral menciptakan ironi yang menggigit. Ekspresi religius seperti azan atau penggunaan simbol-simbol keagamaan digunakan sebagai alat pencitraan, tetapi integritas batin justru diabaikan. Istilah “kuli agamis” menjadi label satir yang menguak kepalsuan iman, ketika kesalehan dijadikan kostum politik semata. Humor dalam kontradiksi ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai bentuk kritik terhadap kecenderungan sosial-politik yang lebih luas. Sebagaimana ditegaskan oleh Yap et al. (2017), humor dapat menjadi mekanisme kritik sosial yang mengungkap ketegangan antara nilai yang diidealkan dengan praktik nyata.

Analisis ini selaras dengan temuan Droog et al. (2020), yang menunjukkan bahwa kemunafikan moral kerap ditoleransi, bahkan dianggap wajar, selama sesuai dengan identitas kelompok atau loyalitas politik. Dalam konteks politik identitas, kesalehan publik dipertontonkan untuk memperoleh simpati massa, walaupun perilaku pribadi para aktor sering kali bertentangan dengan nilai agama yang mereka klaim. Skalicky (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa simbol-simbol agama semakin sering dikomodifikasi untuk membangun resonansi emosional dengan pemilih. Ungkapan satir ini menyingkap strategi politik yang menggunakan agama sebagai alat mobilisasi, bukan sebagai pedoman moral yang konsisten. Hal ini memperlihatkan bagaimana nilai sakral dapat dipolitisasi demi kepentingan pragmatis.

Fenomena ini juga dapat dipahami melalui kerangka Oluremi (2019), yang berpendapat bahwa modernisasi dan persaingan politik sering mendorong agama menjadi identitas publik yang lebih simbolis daripada spiritual. Ungkapan “kuli agamis” menyoroti bagaimana kesalehan ditampilkan sebagai tanda eksternal, sementara substansi moral dikesampingkan. Hal ini memperkuat kritik terhadap bentuk religiositas yang kehilangan kedalaman spiritual, tetapi tetap dijadikan komoditas politik. Sejalan dengan itu, Piata (2016) menekankan bahwa dalam masyarakat modern, agama sering kali direduksi menjadi simbol sosial yang mudah dimanipulasi oleh elit.

Ungkapan ini pada akhirnya berfungsi ganda yakni sebagai pelepas tawa sekaligus sebagai dakwaan moral terhadap fenomena kemunafikan religius. Ekspresi tersebut juga menyoroti adanya kebajikan publik yang hanya menjadi tirai bagi keburukan pribadi. Dengan kata lain, satir ini membantu masyarakat memproses kekecewaan terhadap praktik politik yang memperlakukan agama. Young et al. (2019), menyebutkan bahwa satir politik berfungsi sebagai pedagogi publik yang intim, memungkinkan masyarakat menyalurkan frustrasi mereka melalui tawa yang pahit.

Data 9

“Ruang tamu adalah ibu kota rumah... tapi masih banjir.”

Ungkapan “*Ruang tamu adalah ibu kota rumah... tapi masih banjir.*” memanfaatkan metafora dan ironi untuk menyampaikan kritik sosial-politik yang tajam namun terselubung. Dalam ekspresi ini, “*ruang tamu*” secara metaforis disamakan dengan ibu kota negara yakni pusat perhatian, tempat berlangsungnya pertemuan penting, sekaligus cerminan citra publik dari “rumah” yang dalam konteks ini melambangkan negara. Oleh karena itu, ruang tamu menjadi simbol dari Jakarta, atau lebih luas lagi, pusat pemerintahan Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan Sunarso et al. (2022) bahwa metafora konseptual memungkinkan pengalaman sehari-hari ditransfer untuk memahami fenomena sosial-politik yang lebih kompleks.

Pernyataan bahwa “ibu kota rumah masih banjir” menghadirkan ironi yang kuat. Ruang yang seharusnya bersih, terawat, dan representatif justru digambarkan sebagai kawasan yang tergenang dan terabaikan. Hal ini menjadi sindiran terhadap kegagalan pemerintah dalam menangani persoalan mendasar dan berulang di ibu kota, seperti banjir yang kronis, meskipun telah ada

berbagai janji dan rencana penanganan. Seperti dicatat oleh Pinar-Sanz (2020), banjir Jakarta bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga hasil dari lemahnya tata kelola perkotaan yang konsisten.

Kritik politik yang terkandung di dalamnya adalah bagaimana mungkin seorang pemimpin mengklaim siap “merenovasi rumah orang lain” yang bisa dimaknai sebagai daerah lain, bangsa lain, atau proyek ambisius, sementara “rumahnya sendiri” alias pusat kekuasaan masih kacau? Kalimat ini menyoroti ketimpangan antara retorika politik dengan realitas lapangan. Hal ini sesuai dengan analisis Aspers & Corte (2019) yang menunjukkan bahwa retorika pembangunan sering digunakan elite politik Indonesia sebagai instrumen pencitraan, meski implementasinya lemah di tingkat praksis.

Strategi ini sejalan dengan konsep *vernacular symbolism* yang diungkapkan oleh Putri et al. (2016), yakni penggunaan citra-citra keseharian atau domestik dalam wacana politik untuk memperkuat kedekatan emosional sekaligus menyampaikan kritik sipil. Selain itu, Mudiawati et al. (2023) menegaskan bahwa ironi dalam teks-teks digital dan populer, khususnya dalam bentuk komedi, tidak hanya berfungsi secara estetis, tetapi juga menciptakan sesuatu yang mendorong audiens mempertanyakan realitas yang selama ini dianggap biasa melalui pertentangan makna yang mencolok.

Ungkapan ini memanfaatkan metafora rumah tangga dan ironi simbolik yang berhasil menjangkau lapisan masyarakat akar rumput serta menyuarakan kritik terhadap kegagalan institusional dalam bahasa yang akrab dan berbasis pengalaman hidup. Inilah yang menjadikan kalimat tersebut tak hanya lucu, tetapi juga mengandung daya dorong politis dan intelektual yang signifikan. Seperti disimpulkan Boeynaems et al. (2017), ironi dalam wacana publik bekerja bukan hanya sebagai permainan bahasa, tetapi juga sebagai strategi retorik untuk menyingkap ketidakadilan dan kontradiksi sosial.

Data 10

“Kuli janji merdekakan rumah lain... ruang tamunya belum beres.”

Ungkapan “*Kuli janji merdekakan rumah lain... ruang tamunya belum beres.*” merupakan contoh kuat penggunaan ironi dan metafora untuk menyindir figur politik yang gemar melontarkan janji besar, namun lalai terhadap tanggung jawab dasar yang menjadi kewajibannya. Dalam konteks ini, “kuli” melambangkan seorang politisi atau calon pemimpin. “Rumah” mewakili sebuah wilayah atau negara, sementara “ruang tamu” menjadi metafora untuk pusat pemerintahan atau tugas utama yang seharusnya ditangani terlebih dahulu. Hal ini selaras dengan teori Zappavigna (2022), yang menyebutkan bahwa metafora konseptual memungkinkan pengalaman sehari-hari digunakan untuk memahami persoalan politik yang kompleks.

Ketika seorang “kuli” menyatakan akan “memerdekakan rumah lain” padahal “ruang tamunya sendiri belum beres,” pernyataan tersebut memperlihatkan ketimpangan antara ambisi politik yang menggebu dan realitas performa yang belum terbukti. Ironi muncul dari kontras antara retorika heroik dan persoalan mendasar yang dibiarkan terbengkalai. Sindiran ini sejalan dengan analisis Silaški & Đurović, (2019) yang menunjukkan bahwa politik di Indonesia sering kali didominasi oleh retorika pembangunan dan janji populis yang tidak sebanding dengan kinerja nyata. Humor ironi ini memperlihatkan bagaimana kesenjangan antara wacana politik dan implementasi dapat dikritisi secara efektif.

Kritik semacam ini berkaitan erat dengan apa yang disebut Musolff (2021) sebagai *discursive populism*, yakni strategi komunikasi politik yang bertumpu pada janji berlebihan dan gestur simbolik, namun menutupi ketidakefektifan praktis di lapangan. Lebih lanjut, Dugalich (2018) menekankan bahwa humor, khususnya ironi dalam satire politik, mendorong apa yang mereka sebut sebagai *inferential engagement* dari audiens, yakni proses ketika pendengar atau pembaca secara aktif mengisi celah antara makna harfiah dan pesan tersembunyi. Hal ini membuat kritik lebih menggugah dan berkesan, karena melibatkan partisipasi intelektual masyarakat dalam menafsirkan sindiran yang terselubung.

Pesan politik yang tersirat sangat jelas yaitu pemimpin atau mereka yang berambisi menjadi pemimpin harus membuktikan kapasitasnya dengan menyelesaikan tanggung jawab dasar terlebih dahulu, sebelum melontarkan janji besar yang menyangkut kepentingan kolektif yang lebih luas. Ungkapan ini mengecam janji kosong yang sering kali lebih menonjolkan pencitraan daripada kinerja nyata. Sebagaimana Fubara (2020), menegaskan, ironi dalam wacana publik berfungsi bukan hanya sebagai permainan bahasa, melainkan juga sebagai strategi retorik untuk membongkar kontradiksi sosial dan menyingkap ketidakadilan.

Ungkapan ini menunjukkan bagaimana metafora dan ironi tidak hanya bekerja pada ranah estetika, tetapi juga berfungsi sebagai alat strategis dalam membongkar ketidakkonsistenan politik serta dangkalnya moralitas elite. Kritik berbasis simbol domestik menjadikan pesan lebih akrab dan mudah dipahami masyarakat akar rumput. Sebagaimana Syamsiyah & Rosita (2020), tekankan, ironi dalam komunikasi digital memiliki daya untuk menciptakan pemikiran yang mendorong audiens merefleksikan kembali realitas politik yang selama ini diterima begitu saja

Data 11

“Dia cuma ibu kantin... anak mandor.”

Ungkapan “*Dia cuma ibu kantin... anak mandor.*” menggunakan metafora simbolik dan satire tajam untuk menyindir struktur kekuasaan informal dan praktik nepotisme dalam sistem politik. Secara harfiah, kalimat ini menggambarkan seseorang yang hanya bekerja sebagai ibu kantin posisi yang tampaknya rendah atau tak berpengaruh, namun karena ia adalah anak mandor, ia memiliki kuasa yang melampaui peran formalnya. Hal ini sesuai dengan pandangan Mushtaq et al. (2025) tentang *hidden transcripts*, yaitu praktik kuasa tersembunyi yang berjalan di balik struktur formal institusi.

Metafora ini mencerminkan kenyataan yang kerap terjadi dalam birokrasi dan politik, figur-figur yang tidak memiliki wewenang resmi justru memegang pengaruh besar karena hubungan keluarga atau jejaring informal. Sosok ibu kantin di sini melambangkan tokoh-tokoh latar yang secara struktur tampak tak berdaya, namun mampu mengendalikan keputusan karena kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan. Seperti diungkapkan (Brugman et al., 2023), modal sosial dapat berperan sama kuatnya, bahkan lebih dominan daripada modal institusional dalam menentukan akses terhadap kekuasaan.

Fenomena ini selaras dengan konsep *relational legitimacy* dari Tameryan et al. (2018), yang menyatakan bahwa dalam banyak sistem hierarkis terutama di negara demokrasi berkembang legitimasi kekuasaan kerap disahkan melalui ikatan sosial dan kekerabatan, bukan kredensial formal. Ungkapan ini menyindir bagaimana hak istimewa diwariskan, bukan diperjuangkan, sehingga nepotisme merusak struktur hierarki dan menyingkirkan prinsip keadilan institusional. Dalam kerangka yang sama, Pettersson et al. (2023) menekankan bahwa elit politik sering melanggar kekuasaan melalui mekanisme keluarga dan patronasi.

Lebih lanjut, Baym & Sujoko (2020) menyebut bahwa humor dalam wacana politik kerap berfungsi sebagai *strategic authenticity*, yakni ketika satire digunakan untuk mengungkap kontradiksi institusi melalui bahasa akrab dan citra yang mudah dikenali publik. Dengan menghadirkan sosok domestik seperti ibu kantin, metafora ini menjadi sindiran efektif tentang bagaimana otoritas informal justru mampu menyingkirkan otoritas formal. Ironi ini sesuai dengan pemikiran Senkbeil (2017), yang menjelaskan bahwa humor politis mampu menyingkap ketimpangan sosial dengan cara yang lebih mudah dicerna masyarakat.

Secara politis, kalimat ini mengkritik sistem di mana akses dan pengaruh ditentukan bukan oleh kompetensi, melainkan oleh privilese dinasti. Ini adalah komentar tajam terhadap bagaimana idealisme demokrasi sering dikhianati oleh jejaring kekuasaan berbasis keluarga. Dengan mengangkat imaji domestik yang dekat dengan keseharian, ungkapan ini membuka tabir disfungsi sosial dan politik yang lebih luas, bahwa kekuasaan sejati kerap berada di balik layar, dijaga dan dilanggengkan bukan oleh kinerja, tetapi oleh garis keturunan. Sejalan dengan Anderson et al.

(2017), fenomena ini memperlihatkan bagaimana struktur sosial tetap mempengaruhi tindakan politik meskipun demokrasi menawarkan ruang kesetaraan.

Data 12

“Kalau mau kerja harus izin dulu ke ibu kantin.”

Kalimat “*Kalau mau kerja harus izin dulu ke ibu kantin.*” merupakan satire tajam yang memanfaatkan ironi dan metafora simbolik untuk mengkritik struktur kekuasaan informal yang tidak seharusnya memiliki otoritas. Secara literal, kalimat ini terdengar lucu dan tidak masuk akal, seorang pekerja proyek harus meminta izin kepada ibu kantin, sosok yang secara logis tidak memiliki peran dalam proses teknis maupun struktural pekerjaan. Namun di balik kelucuan itu, pernyataan ini mencerminkan realitas politik dan birokrasi di mana otoritas tidak selalu berada di tangan posisi formal, melainkan pada individu yang memiliki hubungan pribadi dengan pemimpin atau elit. Hal ini sesuai dengan analisis Schoor (2015), mengenai *hidden dimension*, di mana kekuasaan yang tersembunyi sering kali lebih menentukan daripada aturan resmi.

Dalam metafora ini, ibu kantin melambangkan aktor-aktor tak resmi yang memegang pengaruh bukan karena jabatan atau kompetensi, tetapi karena relasi kekerabatan atau kedekatan pribadi dengan pusat kekuasaan. Ia menjadi simbol dari sistem patronasi, di mana keputusan penting tidak lagi berdasarkan struktur institusional atau aturan, melainkan bergantung pada restu figur-figur berpengaruh di balik layar. Seperti dijelaskan Pardede et al. (2023), modal sosial dapat menjadi sumber kuasa yang melampaui modal institusional, sehingga hubungan personal bisa lebih menentukan daripada aturan formal.

Fenomena ini sejalan dengan analisis Hellmann (2023) tentang *institutional informality* dalam ekonomi politik, yang menunjukkan bahwa relasi informal kerap mengesampingkan hierarki formal dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih ditentukan oleh akses serta afiliasi ketimbang hukum. Yap et al. (2017) juga menegaskan bahwa satire dan ironi dapat berfungsi sebagai intervensi dalam ruang-ruang demokratis, karena ia mampu membuka tabir ketimpangan dan memperlihatkan kontradiksi dalam sistem politik. Dalam perspektif yang lebih luas, Boeynaems et al. (2017), menambahkan bahwa praktik patronasi dan jaringan keluarga merupakan salah satu cara utama elit mempertahankan kekuasaan, meski secara normatif hal tersebut melemahkan sistem.

Ironi dalam kalimat ini muncul dari kontras antara ideal struktur kerja yang rasional dengan kenyataan bahwa akses terhadap pekerjaan serta pengambilan keputusan justru melewati jalur tidak resmi. Hal ini memperlihatkan paradoks demokrasi modern sebagaimana dikatakan Young et al. (2019), di mana struktur sosial sering kali masih membatasi prinsip kesetaraan yang dijanjikan demokrasi. Dengan demikian, metafora “*izin ke ibu kantin*” merupakan kritik sistemik terhadap birokrasi yang tidak efisien, nepotistik, dan jauh dari transparansi.

Kalimat ini berhasil menghadirkan kritik sosial-politik yang tajam dalam bentuk yang ringan namun menggigit. Humor politik, sebagaimana dijelaskan oleh (Silaški & Đurović, 2019), bekerja sebagai *strategic authenticity*, yaitu strategi retorik untuk mengungkap kontradiksi institusional melalui bahasa yang sederhana dan dekat dengan keseharian publik. Ungkapan ini tidak hanya mengundang senyum, tetapi juga memicu refleksi mendalam mengenai realitas kekuasaan dalam berbagai institusi.

Data 13

“Mandor pertama bilang: lebih berat melawan kuli dari proyek sendiri.”

Kalimat “*Mandor pertama bilang: lebih berat melawan kuli dari proyek sendiri.*” merupakan sebuah kritik politik yang kuat, yang disampaikan melalui majas paradoks dan metafora. Kalimat ini menyiratkan kekecewaan mendalam terhadap pengkhianatan dari dalam sistem itu sendiri. Kritik

semacam ini menegaskan bahwa persoalan terbesar dalam politik sering kali bukan berasal dari pihak luar, melainkan dari mereka yang berada di lingkaran dalam kekuasaan. Menurut Burgos et al. (2025), ancaman terhadap demokrasi justru sering lahir dari aktor internal yang menggunakan legitimasi untuk merusak norma-norma demokratis.

Secara denotatif, pernyataan tersebut menggambarkan pengakuan seorang “mandor pertama” atau pemimpin awal sebuah proyek bahwa tantangan terberat tidak berasal dari lawan eksternal, melainkan dari orang-orang yang bekerja di bawahnya. Konotasinya lebih dalam, karena kalimat itu menyindir konflik internal dalam pemerintahan atau organisasi. Mereka yang seharusnya menjadi mitra kerja justru saling menjatuhkan demi kepentingan pribadi. Hal ini sejalan dengan temuan Piata (2016) yang menegaskan bahwa erosi norma demokrasi lebih sering dipicu oleh perilaku aktor internal ketimbang ancaman luar.

Bahasa metaforis juga hadir melalui penggunaan istilah *mandor*, *kuli*, dan *proyek* yang merepresentasikan struktur sosial-politik. Mandor melambangkan sosok pemimpin atau reformis, kuli menggambarkan pejabat pelaksana atau elit politik, sedangkan proyek menjadi simbol bangsa maupun agenda reformasi. Paradoks tercermin dalam kenyataan bahwa musuh terbesar justru berasal dari orang-orang yang ikut membangun sistem tersebut. Dalam konteks ini, Droog et al. (2020) berpendapat bahwa kelemahan institusi politik sering kali muncul akibat ketidakmampuan aktor internal menjaga stabilitas aturan bersama.

Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian Dugalich (2018), yang menunjukkan bahwa konflik elit internal di negara-negara pasca-transisi demokrasi sering berakar pada faksionalisasi kekuasaan yang bersifat personal. Mantan sekutu politik yang seharusnya menjaga stabilitas justru berubah menjadi rival yang merusak perkembangan institusional. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ancaman internal dapat lebih berbahaya daripada tekanan eksternal. Seperti ditegaskan Skalicky (2019), fragmentasi elit sering kali menghambat konsolidasi demokrasi karena kepentingan jangka pendek lebih diutamakan daripada kepentingan bangsa.

Dalam konteks politik Indonesia pasca-Reformasi, kritik ini sangat relevan karena dinamika elit sering ditandai dengan fragmentasi, pengkhianatan ideologis, dan pelemahan nilai demokratis. Dugalich (2018) menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia kerap mengalami penurunan kualitas akibat tarik-menarik kepentingan elit yang berorientasi pragmatis. Hal ini menciptakan paradoks reformasi yang awalnya dimaksudkan untuk memperkuat demokrasi justru melemah karena ulah aktor-aktor dari dalam sistem itu sendiri. Kalimat simbolis tersebut bukan hanya refleksi, tetapi juga peringatan politik bahwa kekuasaan sejati diuji dalam menjaga integritas terhadap ancaman internal.

D. Penutup

Penelitian ini memperlihatkan bahwa *stand-up comedy* di Indonesia memiliki peran yang jauh lebih kompleks daripada sekadar hiburan semata, sebab panggung komedi berfungsi sebagai arena wacana kritis yang memungkinkan lahirnya perspektif alternatif terhadap realitas sosial-politik yang sering kali dikendalikan oleh elit. Melalui penggunaan bahasa kiasan, seperti metafora, ironi, paradoks, dan satir, para komika tidak hanya memancing tawa, tetapi juga mendekonstruksi ideologi politik yang mapan. Representasi pekerjaan sederhana, misalnya mandor, kuli, pengawas proyek, dan ibu kantin, dijadikan simbol kuat yang mengungkap relasi kuasa tersembunyi sekaligus menyoroti praktik korupsi, nepotisme, serta ketidakadilan sistemik dalam struktur kekuasaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa humor memiliki kekuatan dalam meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap isu-isu politik yang kompleks, karena *stand-up comedy* menciptakan ruang wacana alternatif yang menantang narasi dominan dengan menyajikan kritik secara ringan namun tetap tajam. Kehadiran komedi sebagai media reflektif memberikan kesempatan bagi audiens untuk menafsirkan ulang realitas politik dan mempertanyakan legitimasi elit yang berkuasa, sehingga dapat dipandang tidak hanya sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap

status *quo*, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat partisipasi demokratis serta memperluas ruang diskusi publik dalam konteks demokrasi kontemporer.

Daftar Pustaka

- Al Arief, Y. (2023). Politeness in roasting: When humour meets power. *Journal of Linguistics, Culture and Communication*, 1(1), 67–78. <https://doi.org/10.61320/jolcc.v1i1.67-78>
- Anderson, J., Zhu, Y., Zhuang, J., Nelson, J. C., Bresnahan, M. J., & Yan, X. (2017). Metaphors that communicate weight-based stigma in political news: A case study of New Jersey Governor Chris Christie. *European Review of Applied Psychology*, 67(3), 139–146. <https://doi.org/10.1016/j.erap.2016.12.007>
- Ariesta, W., Qoyyimah, A. L. N., & Markhamah, M. (2021). Pergeseran bahasa baku: Ragam bahasa elitis dalam akun Instagram humor Recehku. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 4(3), 259–274. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v4i3.159>
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is qualitative in qualitative research. *Qualitative Sociology*, 42(2), 139–160. <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>
- Beck, D. (2024). Humorous parodies of popular culture as strategy in Boris Johnson's populist communication. *The British Journal of Politics and International Relations*, 26(3), 830–847. <https://doi.org/10.1177/13691481231174165>
- Beck, D. (2024). *Parody, popular culture and the politics of statecraft: Analysing the intersection of international relations and parodic humour* [Doctoral dissertation, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg]. https://opendata.uni-halle.de/bitstream/1981185920/118436/1/Beck%2C%20Daniel_Dissertation_2024.pdf
- Boeynaems, A., Burgers, C., Konijn, E. A., & Steen, G. J. (2017). The effects of metaphorical framing on political persuasion: A systematic literature review. *Metaphor and Symbol*, 32(2), 118–134. <https://doi.org/10.1080/10926488.2017.1297623>
- Boykoff, M., & Osnes, B. (2019). A laughing matter? Confronting climate change through humor. *Political Geography*, 68, 154–163. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2018.09.006>
- Brugman, B. C., Burgers, C., & Vis, B. (2019). Metaphorical framing in political discourse through words vs. concepts: A meta-analysis. *Language and Cognition*, 11(1), 41–65. <https://doi.org/10.1017/langcog.2019.5>
- Brugman, B. C., Burgers, C., Beukeboom, C. J., & Konijn, E. A. (2021). From *The Daily Show* to *Last Week Tonight*: A quantitative analysis of discursive integration in satirical television news. *Journalism Studies*, 22(9), 1181–1199. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2021.1929416>
- Brugman, B. C., Burgers, C., Beukeboom, C. J., & Konijn, E. A. (2023). Humor in satirical news headlines: Analyzing humor form and content, and their relations with audience engagement. *Mass Communication and Society*, 26(6), 963–990. <https://doi.org/10.1080/15205436.2022.2144747>
- Burgers, C., Konijn, E. A., & Steen, G. J. (2016). Figurative framing: Shaping public discourse through metaphor, hyperbole, and irony. *Communication Theory*, 26(4), 410–430. <https://doi.org/10.1111/comt.12096>
- Burgos, M., Politico, J., & Vergara, M. (2025). The use of humor, irony, and metaphors in everyday communication: An exploratory investigation. *Journal of Interdisciplinary Perspectives*, 3(2), 134–141. <https://doi.org/10.69569/jip.2024.0610>

- Charteris-Black, J. (2009). Metaphor and political communication. In *Metaphor and discourse* (pp. 97–115). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9780230594647_7
- Charteris-Black, J. (2011). Metaphor in political discourse. In *Politicians and rhetoric: The persuasive power of metaphor* (pp. 28–51). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9780230319899_2
- Davis, J. L., Love, T. P., & Killen, G. (2018). Seriously funny: The political work of humor on social media. *New Media & Society*, 20(10), 3898–3916. <https://doi.org/10.1177/1461444818762602>
- Droog, E., & Burgers, C. (2023). Metaphorical humor in satirical news shows: A content analysis. *Metaphor and Symbol*, 38(3), 275–290. <https://doi.org/10.1080/10926488.2022.2160252>
- Droog, E., Burgers, C., & Steen, G. J. (2020). How satirists alternate between discursive modes: An introduction of the humoristic metaphors in satirical news (HMSN) typology. *International Journal of Communication*, 14.
- Dugalich, N. M. (2018). Political cartoon as a genre of political discourse. *RUDN Journal of Language Studies, Semiotics and Semantics*, 9(1), 158–172. <https://doi.org/10.22363/2313-2299-2018-9-1-158-172>
- Fairclough, N. (2023). Critical discourse analysis. In *The Routledge handbook of discourse analysis* (pp. 11–22). Routledge.
- Forceville, C. (2024). Identifying and interpreting visual metaphors in political cartoons. *Metaphor in Socio-Political Contexts: Current Crises*, 54, 255. <https://doi.org/10.1515/9783111001364>
- Frosh, P. (2011). Framing pictures, picturing frames: Visual metaphors in political communications research. *Journal of Communication Inquiry*, 35(2), 91–114. <https://doi.org/10.1177/0196859911410242>
- Fubara, S. J. (2020). A pragmatic analysis of the discourse of humour and irony in selected memes on social media. *International Journal of Language and Literary Studies*, 2(2), 76–95. <https://doi.org/10.36892/ijlls.v2i2.281>
- Hellmann, O. (2023). Animated satire and collective memory: Reflecting on the American “history wars” with *The Simpsons*. *HUMOR*, 36(4), 567–586. <https://doi.org/10.1515/humor-2022-0131>
- Kfrerer, M. L., Bell, E., & Schermer, J. A. (2021). The politics of being funny: Humor styles, trait humorousness, and political orientations. *Personality and Individual Differences*, 182, 111073. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111073>
- Lee, H., & Kwak, N. (2016). The affect effect of political satire: Sarcastic humor, negative emotions, and political participation. In *Entertainment media and politics* (pp. 5–26). Routledge. <https://doi.org/10.1080/15205436.2014.891133>
- Leymann, S., Lentz, T. O., & Burgers, C. (2022). Prosodic markers of satirical imitation. *Humor*, 35(4), 509–529. <https://doi.org/10.1515/humor-2021-0138>
- Mammadov, A., & Mammadov, M. (2014). The role of figurative language in political discourse. *Stud. lang. cult. soc*, 3, 113–127.
- Mio, J. S. (2018). Metaphor, politics, and persuasion. In *Metaphor* (pp. 127–146). Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9781315789316-8>
- Mudiawati, R. C., Hudiyono, Y., & Suhatmady, B. (2023). Analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap bahasa slogan aksi demonstrasi guru di Samarinda. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 6(3), 739–762. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v6i3.694>

- Mushtaq, S., Sadia, H., & Baig, F. (2025). Between humor and harm: Political memes and their effects on youth's political efficacy. *Human Nature Journal of Social Sciences*, 6(2), 226–234. <https://doi.org/10.71016/hnjss/2v62k225>
- Musolff, A. (2017). Metaphor, irony and sarcasm in public discourse. *Journal of Pragmatics*, 109, 95–104. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2016.12.010>
- Musolff, A. (2021). Hyperbole and emotionalisation: Escalation of pragmatic effects of proverb and metaphor in the “Brexit” debate. *Russian Journal of Linguistics*, 25(3), 628–644. <https://doi.org/10.22363/2687-0088-2021-25-3-628-644>
- Musolff, A. (2022). “World-beating” pandemic responses: Ironical, sarcastic, and satirical use of war and competition metaphors in the context of COVID-19 pandemic. *Metaphor and Symbol*, 37(2), 76–87. <https://doi.org/10.1080/10926488.2021.1932505>
- Pardede, P., Rasyid, Y., & Anwar, M. (2023). Manipulasi linguistik sebagai instrumen politik dalam *Animal Farm*: Sebuah analisis wacana kritis. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 6(2), 449–466. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v6i2.605>
- Pettersson, K., Martikainen, J., Hakoköngäs, E., & Sakki, I. (2023). Female politicians as climate fools: Intertextual and multimodal constructions of misogyny disguised as humor in political communication. *Political Psychology*, 44(1), 3–20. <https://doi.org/10.1111/pops.12814>
- Piata, A. (2016). When metaphor becomes a joke: Metaphor journeys from political ads to internet memes. *Journal of Pragmatics*, 106, 39–56. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2016.10.003>
- Pinar-Sanz, M. J. (2020). Humour and intertextuality in Steve Bell's political cartoons. *The European Journal of Humour Research*, 8(3), 16–39. <https://doi.org/10.7592/ejhr2020.8.3.pinar-sanz>
- Putri, M. W., Oktoma, E., & Nursyamsu, R. (2016). Figurative language in English stand-up comedy. *English Review: Journal of English Education*, 5(1), 115–130. <https://doi.org/10.25134/ERJEE.V5I1.396>
- Risnawati, E., Gunawan, W., Fatinova, D., & Mubarak, Y. (2024). Humor discourse structure: A political communication strategy. *Scope: Journal of English Language Teaching*, 9(1), 148–154. <https://doi.org/10.30998/scope.v9i1.23968>
- Rosita, F. Y., & Hastuti, D. P. (2025). Representasi perempuan dalam film *Like & Share*: Analisis wacana kritis Sara Mills. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 8(3), 717–726. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v8i3.1275>
- Ross, A. S. (2020). Discursive delegitimation in metaphorical #secondcivilwarletters: An analysis of a collective Twitter hashtag response. *Critical Discourse Studies*, 17(5), 510–526. <https://doi.org/10.1080/17405904.2019.1661861>
- Salsabila, B. V., & Simatupang, E. C. (2021). Satir on the political meme of President Donald Trump: A semantic. *English Journal Literacy Utama*, 5(1), 381–387. <https://doi.org/10.33197/ejutama.vol5.iss2.2021.137>
- Schoor, C. (2015). Political metaphor, a matter of purposeful style: On the rational, emotional and strategic purposes of political metaphor. *Metaphor and the Social World*, 5(1), 82–101. <https://doi.org/10.1075/msw.5.1.05sch>
- Sedgwick, C. (2024). Comedy, diversity and the hegemonic comedian. In *Inequality in contemporary stand-up comedy in the UK* (pp. 27–42). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-55932-7_2

- Senkbeil, K. (2017). Figurative language in intercultural communication—A case study of German-Southern African international academic discourse. *Intercultural Pragmatics*, 14(4), 465–491. <https://doi.org/10.1515/ip-2017-0022>
- Shao, L., & Liu, D. (2019). The road to cynicism: The political consequences of online satire exposure in China. *Political Studies*, 67(2), 517–536. <https://doi.org/10.1177/0032321718791373>
- Silaški, N., & Đurović, T. (2019). The journey metaphor in Brexit-related political cartoons. *Discourse, Context & Media*, 31, 100318. <https://doi.org/10.1016/j.dcm.2019.100318>
- Skalicky, S. (2019). Investigating satirical discourse processing and comprehension: The role of cognitive, demographic, and pragmatic features. *Language and Cognition*, 11(3), 499–525. <https://doi.org/10.1017/langcog.2019.30>
- Sujoko, A. (2020). Satirical political communication 2019 Indonesia's presidential election on social media. *Informasi*, 50(1), 15–29. <https://doi.org/10.21831/informasi.v50i1.30174>
- Sunarso, S., Setiawan, B., & Anjani, N. P. P. S. (2022). The political satire of Mojok. co in the 2019 Indonesian election. *Heliyon*, 8(7). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10018>
- Tameryan, T. Y., Zheltukhina, M. R., Slyshkin, G. G., Abakumova, O. B., Volskaya, N. N., & Nikolaeva, A. V. (2018). Metaphor in political media discourse: Mental political leader portrait. *Online Journal of Communication and Media Technologies*, 8(4), 377–384. <https://doi.org/10.12973/ojcm/3958>
- Tolulope Abisodun Oluremi. (2019). Pragmeme of political humour in selected Nigerian political cartoons. *Journal of Language and Education*, 5(4), 66–80. <https://doi.org/10.17323/jle.2019.9682>
- Toscano, G. B., & Fernández-Villanueva, C. (2025). “Funny weapons”: The norms of humour in the construction of far-right political polarisation. *Social Inclusion*, 13. <https://doi.org/10.17645/si.10211>
- Weitzel, L., Prati, R. C., & Aguiar, R. F. (2016). The comprehension of figurative language: What is the influence of irony and sarcasm on NLP techniques? In *Sentiment analysis and ontology engineering: An environment of computational intelligence* (pp. 49–74). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-30319-2_3
- Yap, F. H., Chan, A. S. L., & Wai, B. L. M. (2017). Constructing political identities through characterization metaphor, humor and sarcasm: An analysis of the 2012 Legislative Council Election Debates in Hong Kong. In *Not just a laughing matter: Interdisciplinary approaches to political humor in China* (pp. 147–167). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-4960-6_9
- Young, D. G., Bagozzi, B. E., Goldring, A., Poulsen, S., & Drouin, E. (2019). Psychology, political ideology, and humor appreciation: Why is satire so liberal?. *Psychology of Popular Media Culture*, 8(2), 134. <https://doi.org/10.1037/ppm0000157>
- Zappavigna, M. (2022). Social media quotation practices and ambient affiliation: Weaponising ironic quotation for humorous ridicule in political discourse. *Journal of Pragmatics*, 191, 98–112. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.12.003>



Open Access This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under a CC BY-SA 4.0 license. The images or other third-party material in this work are included under the Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material.